



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PALANGKA RAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan disusun sebagai upaya untuk dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan, perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi, sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, tertibnya administrasi hasil kegiatan serta laporan program dan hasil kegiatan kepada publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan disampaikan atas pelaksanaan kewajiban Biro Administrasi Pembangunan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua (ke-3) pelaksanaan Renstra Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 s.d. tahun 2026.

Pelaksanaan kinerja yang termuat dalam laporan ini meliputi: kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan, penyelenggaraan sistem perencanaan maupun pengendalian program pembangunan dan upaya evaluasi dan monitoring pelaporan baik analisis maupun pengkajian kebijakan pembangunan yang bersumber dari dana pusat dan daerah. Target-target kinerja Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan sebagaimana yang telah disusun berdasarkan Rencana Aksi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan 2023 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 s.d 2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan dan bagian yang bermanfaat dari pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Kami menyadari laporan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan.

Palangka Raya, Januari 2024

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| BAB I P E N D A H U L U A N | |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 STRUKTUR ORGANISASI | 2 |
| 1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI | 3 |
| 1.4 LANDASAN HUKUM | 7 |
| 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN | 9 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 2.1 RENCANA STRATEGIS | 11 |
| 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA | 16 |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN | 22 |
| BAB IV P E N U T U P | |
| 4.1 TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN | 25 |
| 4.2 PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA | 26 |
| 4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH | 26 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | Hal. |
|--|------|
| TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 | 14 |
| TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 | 15 |
| TABEL 3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN | 16 |
| TABEL 3.2 PERSENTASE DATA LAPORAN DAN SINKRONISASI DATA CAPAIAN TARGET REALISASI KEUANGAN APBD, APBN PROVINSI/KAB/KOTA SERTA PEMBANGUNAN FISIK PRASARANA SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 | 17 |
| TABEL 3.3 PERBANDINGAN DATA LAPORAN DAN SINKRONISASI DATA CAPAIAN TARGET REALISASI KEUANGAN APBD, APBN PROVINSI/KAB/KOTA SERTA PEMBANGUNAN FISIK PRASARANA SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023 | 18 |
| TABEL 3.4 PERSENTASE PENYAJIAN DATA DAN SINKRONISASI DATA INFORMASI TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 | 19 |
| TABEL 3.5 PERBANDINGAN PERSENTASE PENYAJIAN DATA DAN SINKRONISASI DATA INFORMASI TENTANG PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023 | 19 |
| TABEL 3.6 PERSENTASE DATA LAPORAN DAN SINKRONISASI DATA CAPAIAN TARGET PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI DANA APBD YANG DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 | 21 |
| TABEL 3.7 PERBANDINGAN PERSENTASE DATA LAPORAN DAN SINKRONISASI DATA CAPAIAN TARGET PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG BERSUMBER DARI DANA APBD YANG DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 DAN 2023.. | 22 |
| TABEL 3.8 ALOKASI ANGGARAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2023 | 23 |
| TABEL 3.9 REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA | 24 |



DAFTAR GAMBAR

Hal.

| | | |
|------------|--|----|
| GAMBAR 3.1 | REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 – 2023..... | 23 |
|------------|--|----|



Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|---|
| LAMPIRAN 1 | PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA |
| LAMPIRAN 2 | PERJANJIAN KINERJA 2023 |
| LAMPIRAN 3 | RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023 |
| LAMPIRAN 4 | PENGUKURAN KINERJA 2023 |
| LAMPIRAN 5 | RENCANA KINERJA TAHUN 2024 |
| LAMPIRAN 6 | ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.

Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai:

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

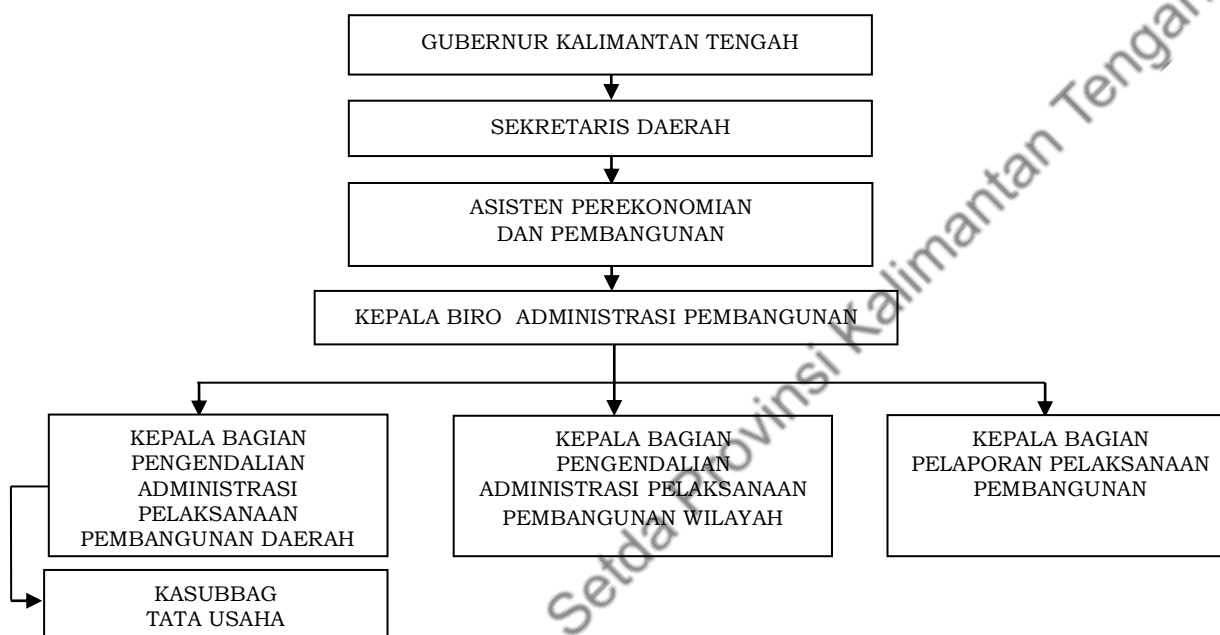
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 68 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Administrasi Pembangunan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan dari pencapaian kinerja, visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 71 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah membawahi Subbagian Tata Usaha.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan

wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah,

pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;

3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Susunan Kepegawaian

Personel Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pegawai, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang PNS dengan pendidikan 10 (sepuluh) orang Pascasarjana (S2), 11 (Sebelas) orang Sarjana (S1), 1 (satu) orang Diploma Tiga (D-III), 3 (tiga) orang SLTA dan 3 (tiga) orang non-PNS (tenaga kontrak) dengan pendidikan 3 (tiga) orang Sarjana (S1). Jurusan pendidikan bervariasi dari berbagai jurusan pendidikan.

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.4. LANDASAN HUKUM
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS
 1. VISI
 2. MISI
 3. TUJUAN DAN SASARAN
 4. STRATEGI PENCAPAIAN
- 2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. CAPAIAN KINERJA
- 3.2. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

- 4.1. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN
- 4.2. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

4.3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

LAMPIRAN



Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 s.d tahun 2026. Rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 s.d. tahun 2026.

1. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, masa bakti Tahun 2021-2026 dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Religius,
Kuat, Amanah dan Harmonis.”

Untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan Administrasi Pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Tugas Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Membangun Pelayanan Aparatur

Pemerintah yang memenuhi azas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam melayani masyarakat / publik di Provinsi Kalimantan tengah.

Sejalan dengan visi Gubernur tersebut Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

2. MISI

- a. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
- b. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
- d. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
- e. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai pada Biro Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan pada Biro Administrasi Pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari

tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 s.d tahun 2026 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis, meliputi:

1. Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang akuntabel dalam melayani masyarakat/publik;
2. Peningkatan pelaporan, analisis dan pengkajian pembangunan;
3. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah;
4. Peningkatan pelayanan dan pengembangan data/informasi;
5. Peningkatan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

4.1 Strategi Biro Administrasi Pembangunan

1. Meningkatnya efektifitas dan kinerja melalui peningkatan tata kelola administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pelaksanaan capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah;
3. Meningkatkan kapasitas cakupan maupun kualitas pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pembinaan.

4.2 Kebijakan Umum Biro Administrasi Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas data informasi dan pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan;
3. Peningkatan akurasi data/informasi pembangunan untuk pengambilan kebijakan;

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan dan dapat memberi solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan di atas, maka Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam Tabel IKU.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| NO. | SASARAN RPJMD | INDIKATOR KINERJA UTAMA | CARA PENGHITUNGAN | SUMBER DATA |
|-----|--|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100% | Biro Administrasi Pembangunan |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah penyampaian data/ total data keseluruhan x 100% | |
| 2. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah paket yang dilaksanakan/ Jumlah Paket yang direncanakan x 100% | Biro Administrasi Pembangunan |

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rencana Kinerja disusun Biro Administrasi Pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis sehingga mendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Perjanjian Kinerja berisi target Renstra

Biro Administrasi Pembangunan tahun 2023 dimana kegiatan pokok/utama adalah meningkatnya cakupan layanan dalam pelaporan yang bersumber dari dana pusat dan daerah dan meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan data informasi pembangunan.

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | 100% |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | 100% |
| 2 | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 95% |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Biro Administrasi Pembangunan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2023. Dalam upayanya untuk meningkatkan akuntabilitas, Biro Administrasi Pembangunan melakukan reviu terhadap indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Awal 2023 | Realisasi |
|----|--|---|------------------|-----------|
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | 100% | 100% |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | 100% | 100% |
| 2. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 95% | 89,14% |

1. Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah

Indikator kinerja:

a. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan

Pembangunan APBD, Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dan Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah. Indikator kinerja ini terlaksana dengan adanya koordinasi dan fasilitasi terhadap monitoring, evaluasi dan penyerapan anggaran dana APBD dan APBN pada Kabupaten/Kota dan Provinsi, proses analisis dan kompilasi data dan informasi serapan anggaran, identifikasi dan analisis kendala permasalahan pelaksanaan pembangunan yang berjalan serta capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan Tengah.

Jumlah persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 100,00% dihitung dari Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100%.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah Tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|----|---|--|-------------|----------------|-------------|
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Capaian realisasi Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah Tahun 2023 telah memenuhi target awal sebesar 100%.

Perbandingan data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah per Tahun Anggaran 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah TA. 2022 dan 2023

| Indikator Kinerja | Persentase Capaian (%) | | |
|--|------------------------|------|---------------------------|
| | 2022 | 2023 | Peningkatan/ Penurunan |
| Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | 100% | 100% | - |

Persentase capaian data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kabupaten/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah pada tahun 2022 dan 2023 tidak mengalami perubahan, tetap tercapai 100%.

b. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) merupakan aplikasi dari Kementerian Sekretariat Negara untuk menyediakan data/informasi dalam menggambarkan keadaan pembangunan di daerah yang sesungguhnya dalam rangka memberikan dukungan teknis kepada presiden/wakil presiden, pimpinan K/L dan Kepala Daerah. Sistem ini menyajikan data informasi tentang pembangunan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dengan persentase capaian sampai dengan 31 Desember

2023 adalah sebesar 100% dari target 100% diukur dari jumlah penyampaian data yang disampaikan oleh SOPD Provinsi maupun Vertikal.

Tabel 3.4
Persentase Penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|----|---|--|-------------|----------------|-------------|
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | 100% | 100% | 100% |

Persentase penyajian data informasi tentang pembangunan daerah (SDDKN) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 telah memenuhi target awal 100%.

Data perbandingan Persentase Penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah per Tahun Anggaran 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Persentase Penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|---|--|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | % | 100,00 | 80,25 | 100,00 | 100,00 |

Dalam pelaksanaannya, jumlah persentase penyajian data informasi tentang pembangunan daerah (SDDKN) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebanyak 19,75% dari 80,25% menjadi 100%, karena terpenuhinya jumlah penyampaian data yang disampaikan.

2. Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Indikator Kinerja:

a. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian indikator kinerja berupa persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan pada pendanaan Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah.

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik tender/nonseleksi maupun nontender/nonseleksi bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia serta mendorong pemerataan ekonomi. Kualitas pekerjaan setelah pelaksanaan pengadaan perlu diperhatikan meskipun ada upaya percepatan penyerapan anggaran sehingga tercapai kuantitas dan kualitas yang tepat. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sebesar 89,14% dihitung dari jumlah paket yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah paket yang direncanakan.

Tabel 3.6

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Awal 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|----|--|---|------------------|----------------|-------------|
| 1. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 95,00% | 89,14% | 93,83% |

Capaian persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 hampir memenuhi target yang direncanakan yaitu sebesar 93,83% dilihat dari realisasi tahun 2023 sebesar 89,14% dibandingkan dengan target awal tahun 2023 sebesar 95%.

Data perbandingan persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per Tahun Anggaran 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Perbandingan Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dan 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
|----|--|---|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | % | 90,00 | 95,86 | 95,00 | 89,14 |

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2022 sebesar 6,72%. Hal ini dikarenakan ada 190 (seratus sembilan puluh) paket pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang tidak dilaksanakan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

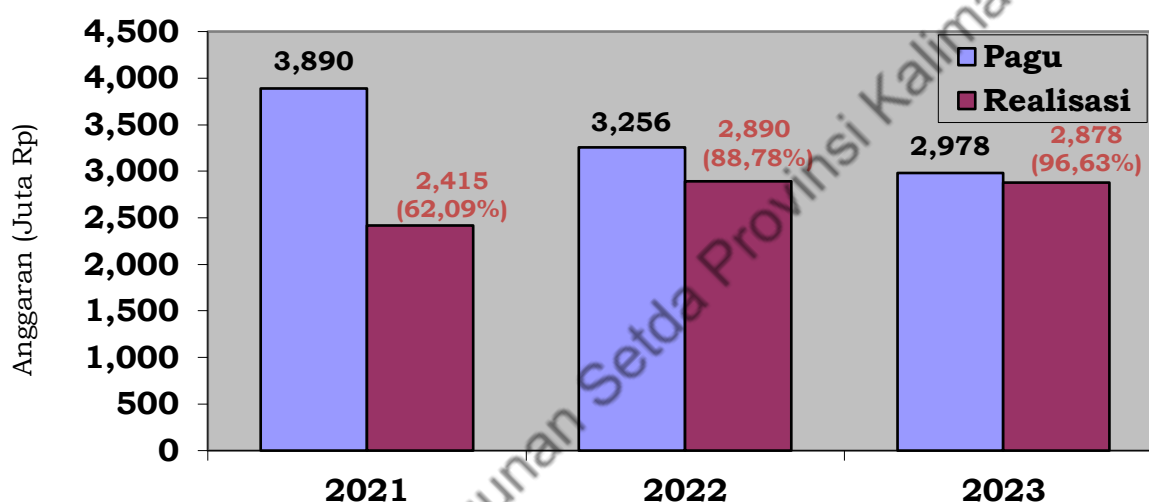
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2023 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2023 sebesar Rp3.321.637.559,00 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2023 sebesar Rp2.978.662.908,00. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan tahun 2021 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dan Gambar 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2023

| NO | ALOKASI ANGGARAN | TAHUN (Rp) | | |
|----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Pagu Perubahan (Rp) | 3.890.237.150,00 | 3.256.175.000,00 | 2.978.662.908,00 |
| 2. | Realisasi Keuangan (Rp) | 2.415.414.157,00 | 2.890.676.029,00 | 2.878.200.936,00 |
| 3. | Prosentase Realisasi (%) | 62,09% | 88,78% | 96,63% |

Sumber: DPPA-SKPD Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2023

Gambar 3.1
Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2023



Capaian realisasi keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan tahun 2023 sebesar 2.878.200.936,00 (96,63%) dari pagu perubahan sebesar Rp2.978.662.908,00. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 9

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

| No | Program | Kegiatan | Anggaran-P 2023 (Rp.) | Realisasi Keuangan 2023 | |
|----|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | (Rp) | (%) |
| 1. | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | | 1.937.820.101 | 1.891.563.468 | 97,61 |
| | 1. | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.045.275.101 | 1.017.580.594 | 97,35 |
| | 1.1 | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 355.007.300 | 337.891.100 | 95,18 |
| | 1.2 | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 216.862.000 | 211.880.850 | 97,70 |
| | 1.3 | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 473.405.801 | 467.808.644 | 98,82 |
| | 2. | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 892.545.000 | 873.982.874 | 97,92 |
| | 2.1 | Sub Kegiatan Analisis Capaian Pembangunan Daerah | 132.600.000 | 132.026.250 | 99,57 |
| | 2.2 | Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 132.600.000 | 132.559.750 | 99,97 |
| | 2.3 | Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 627.345.000 | 609.356.874 | 97,13 |

Secara umum program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja telah direalisasikan hampir mencapai target yakni sebesar 97,61%. Adapun anggaran yang tidak direalisasikan terdapat pada Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah berupa kegiatan makan minum rapat tidak terlaksana, dan yang lainnya berupa selisih harga antara pagu dan realisasi. Capaian realisasi fisik pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah sebesar 99,17%.



BAB IV

P E N U T U P

Menelaah tupoksi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, terdapat beberapa hal yang cukup *visioner* dalam hal fungsi biro tersebut, yaitu mencakup adanya amanat dari Pemerintah Daerah dalam rangka memfokuskan bidang-bidang pembangunan daerah di Kalimantan Tengah untuk mencapai target-target pembangunan pada tataran makro/bidang, bukan hanya tataran mikro yaitu program dan kegiatan sejalan dengan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026, dan visi dan misi Gubernur Kalimantan Tengah.

Dari hasil realisasi dan analisis kinerja kegiatan serta pencapaian sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang telah memenuhi target dan 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya masih dibawah dari target yang telah ditetapkan. Dalam proses pencapaian kinerja kedepan diharapkan seluruh aparatur Biro Administrasi Pembangunan lebih profesional dalam pengelolaan sasaran kinerja Biro sehingga indikator kinerja dapat dicapai sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun berjalan dan target jangka menengah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

4.1 TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN

- a. Meningkatkan kualitas pelaporan dan kajian pembangunan melalui monev kegiatan berjalan dengan meningkatkan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelaksanaan prinsip *good governance*;
- b. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan daerah melalui sinkronisasi aspek pengendalian pembangunan dari aspek perencanaan;
- c. Penguatan sistem teknologi informasi untuk mendukung kualitas percepatan pelayanan publik, dan
- d. Meningkatkan pengembangan data/informasi.

4.2 PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Adapun permasalahan atau kendala yang ada dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Tujuan pengendalian perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dan rencana dari Biro Administrasi Pembangunan kurang tercapai;
2. Permintaan target pelaksanaan program kegiatan yang meningkat tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas peningkatan kinerja, perbaikan kualitas perencanaan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berikut strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan:

1. Terhadap indikator kinerja yang masih dibawah target perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian dari kinerja yang sudah diperjanjikan, disertai dengan pengumpulan data dan informasi yang efektif;
2. Terhadap indikator kinerja yang belum tercapai, perlu dilakukan reviu bersama dan reviu berkala pada perencanaan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2024

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,

| BIRO ADM. PEMBANGUNAN | |
|-----------------------|--|
| KABAG | |
| KASUBBAG | |
| PELAKSANA | |

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196908061989111002

4.2 PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA

Adapun permasalahan atau kendala yang ada dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Tujuan pengendalian perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dan rencana dari Biro Administrasi Pembangunan kurang tercapai;
2. Permintaan target pelaksanaan program kegiatan yang meningkat tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas peningkatan kinerja, perbaikan kualitas perencanaan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

4.3 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Berikut strategi pemecahan masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan:

1. Terhadap indikator kinerja yang masih dibawah target perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap capaian dari kinerja yang sudah diperjanjikan, disertai dengan pengumpulan data dan informasi yang efektif;
2. Terhadap indikator kinerja yang belum tercapai, perlu dilakukan reviu bersama dan reviu berkala pada perencanaan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2024

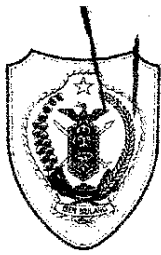
Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111

Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HM. ISTANI, SH., M.A.P**

Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si.**

Jabatan : **Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

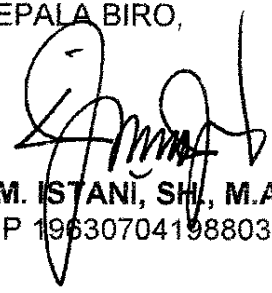
Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si.
NIP. 196506101991031025

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,


HM. ISTANI, SH., M.A.P
NIP. 196307041988031015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tugas dan Fungsi:

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

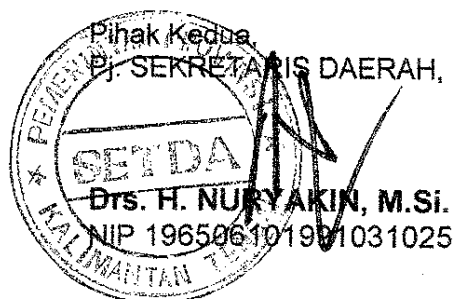
- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Cara Perhitungan | Sumber Data |
|-----|--|---|---|--|
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100% | Biro Administrasi Pembangunan Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah penyampaian data/ total data keseluruhan x 100% | Biro Administrasi Pembangunan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |
| 2. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Jumlah paket yang dilaksanakan/ Jumlah Paket yang direncanakan x 100% | Biro Administrasi Pembangunan Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan |

Palangka Raya, Januari 2022

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,

HM. ISTANI, SH., M.A.P
NIP 196307041988031015



Pihak Kedua,
PJ. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si.
NIP 196506101991031025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HM. ISTANI, SH., M.A.P**

Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. NURYAKIN, M.Si.**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si.
NIP. 196506101991031025

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,

HM. ISTANI, SH., M.A.P
NIP. 196307041988031015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | % | 100 |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | % | 100 |
| 2. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | % | 95 |

Program

Anggaran

Keterangan

Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Rp. 2.140.374.100

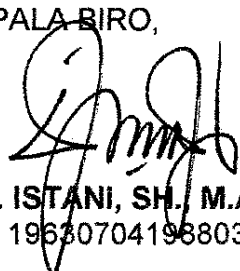


Pihak Kedua,
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. NURYAKIN, M.Si.
NIP. 196506101991031025

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,


HM. ISTANI, SH., M.A.P.
NIP. 196307041988031015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HM. ISTANI, SH., M.A.P**

Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA BIRO



HM. ISTANI, SH., M.A.P

NIP. 196307041988031015



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Target Realisasi Kinerja | | | | Ket |
|----|--|---|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-----|
| | | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | % | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | % | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | |
| 2. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | % | 95 | 20 | 30 | 30 | 15 | |

B. Target Realisasi Keuangan

| No | Program | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Target Realisasi Keuangan (Rp.) | | | | Ket |
|----|--|--|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| | | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| 1. | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | | 2.140.374.100 | 292.016.260 | 710.759.860 | 688.284.610 | 449.313.370 | |
| | 1. | Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.054.779.100 | 178.395.510 | 300.787.310 | 381.755.210 | 193.841.070 | |
| | 1.1 | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 355.007.300 | 71.001.460 | 89.490.060 | 98.734.360 | 95.781.420 | |
| | 1.2 | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 216.862.000 | 37.337.600 | 56.006.400 | 95.514.800 | 28.003.200 | |
| | 1.3 | Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 482.909.800 | 70.056.450 | 155.290.850 | 187.506.050 | 70.056.450 | |
| | 2. | Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.085.595.000 | 113.620.750 | 409.972.550 | 306.529.400 | 255.472.300 | |
| | 2.1 | Sub Kegiatan Analisis Capaian Pembangunan Daerah | 132.600.000 | 27.156.450 | 39.143.550 | 45.137.100 | 21.162.900 | |
| | 2.2 | Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 132.600.000 | 23.713.300 | 31.758.000 | 61.249.700 | 15.879.000 | |
| | 2.3 | Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 820.395.000 | 62.751.000 | 339.071.000 | 200.142.600 | 218.430.400 | |

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA BIRO,

NM. ISTANI, SH., M.A.P

NIP. 196307041988031015

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

SKPD

: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran

: 2023

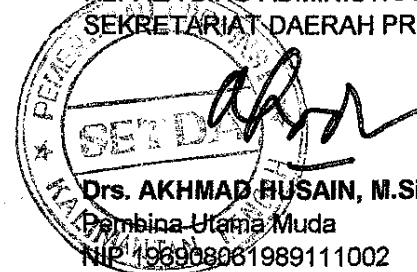
| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | PERSENTASE (%) |
|-----|--|---|--------|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/4)*100 |
| 1 | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | 100 % | 100 % | 100,00 |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | 100 % | 100 % | 100,00 |
| 2 | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 95 % | 89,14 % | 93,83 |

Jumlah Anggaran :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023 : Rp2.978.662.908,00

Palangka Raya, Januari 2024

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telepon 0536-3239379, Fax 0536-3239378 email: biroadbang@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target |
|-----|--|---|--------|--------|
| 1. | Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah | % | 100 |
| | | Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah | % | 100 |
| 2. | Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | % | 98 |

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA BIRO,


HM. ISTANI, S.H., M.A.P.
NIP. 196307041988031015

**ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

| URAIAN | ANGGARAN | | | REALISASI ANGGARAN | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | |
| BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 3.886.958.150 | 3.256.175.000 | 2.978.662.908 | 2.415.414.157 | 2.890.676.029 | 2.878.200.936 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | 1.172.292.000 | 1.272.511.600 | 1.040.842.807 | 785.453.007 | 990.024.479 | 986.637.468 |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 26.210.000 | 29.489.000 | 29.943.000 | 17.253.000 | 17.878.000 | 22.101.250 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 18.600.000 | 8.304.000 | 8.472.000 | 9.745.000 | 5.245.000 | 5.936.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD | 0 | 2.002.000 | 1.980.000 | 0 | 875.000 | 900.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD | 0 | 2.288.000 | 2.310.000 | 0 | 1.000.000 | 1.650.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD | 0 | 2.860.000 | 2.904.000 | 0 | 1.875.000 | 2.220.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD | 0 | 3.146.000 | 3.168.000 | 0 | 1.375.000 | 2.340.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 3.279.000 | 3.345.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 2.688.250 |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7.610.000 | 7.610.000 | 7.764.000 | 5.678.000 | 5.678.000 | 6.367.000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.830.000 | 17.818.000 | 13.979.400 | 4.576.000 | 14.598.000 | 11.868.075 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.601.500 | 1.920.000 | 1.920.000 | 2.680.000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.300.000 | 14.288.000 | 10.377.900 | 2.656.000 | 12.678.000 | 9.188.075 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 472.671.000 | 514.407.000 | 438.453.848 | 314.171.900 | 473.928.150 | 412.116.496 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 140.921.000 | 140.921.000 | 143.777.200 | 106.945.400 | 109.784.750 | 127.407.850 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 25.750.000 | 40.000.000 | 40.811.400 | 18.920.000 | 32.920.000 | 32.249.450 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 306.000.000 | 333.486.000 | 253.865.248 | 188.306.500 | 331.223.400 | 252.459.196 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 621.591.000 | 665.797.600 | 512.553.759 | 417.773.907 | 446.450.829 | 501.967.847 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 67.000.000 | 177.660.000 | 181.264.500 | 50.279.000 | 162.855.000 | 181.100.250 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 139.000.000 | 139.000.000 | 141.969.259 | 86.591.620 | 137.093.610 | 132.417.125 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 415.591.000 | 349.137.600 | 189.320.000 | 280.903.287 | 146.501.919 | 188.450.472 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 44.990.000 | 45.000.000 | 45.912.800 | 31.678.200 | 37.169.800 | 38.583.800 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.405.800 | 13.988.200 | 16.444.800 | 19.313.800 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 24.990.000 | 25.000.000 | 25.507.000 | 17.690.000 | 20.725.000 | 19.270.000 |
| PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 2.714.666.150 | 1.983.663.400 | 1.937.820.101 | 1.629.961.150 | 1.900.651.550 | 1.391.563.468 |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.043.741.450 | 1.085.953.400 | 1.045.275.101 | 879.777.950 | 1.051.118.450 | 1.017.580.594 |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 273.532.500 | 354.646.500 | 355.007.300 | 223.068.500 | 338.732.850 | 337.891.100 |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 288.086.500 | 212.609.900 | 216.862.000 | 242.864.800 | 204.671.900 | 211.880.850 |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 482.122.450 | 518.697.000 | 473.405.801 | 413.844.650 | 507.713.700 | 467.808.644 |

| URAIAN | ANGGARAN | | | REALISASI ANGGARAN | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 1.670.924.700 | 897.710.000 | 892.545.000 | 750.183.200 | 849.633.100 | 873.982.874 |
| Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 200.000.000 | 180.000.000 | 132.600.000 | 138.413.400 | 179.550.000 | 132.026.250 |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 200.000.000 | 205.000.000 | 132.600.000 | 158.485.000 | 157.273.100 | 132.599.750 |
| Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 1.270.924.700 | 512.710.000 | 627.345.000 | 453.284.800 | 512.710.000 | 609.356.874 |

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah